

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, AMP YKPN.

Safri Nugraha et al, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Depok Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Panca Kurniawan, Agus Purwanto, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Indonesia*, Malang, Banyumedia.

Sulaiman Anwar, 2000, *Pengantar Keuangan Negara dan Daerah*, Jakarta, STIA-LAN Press.

Kesit Bambang Prakoso, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Press.

Irwansyah Lubis, 2010, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta, Kompas Gramedia.

Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat

Sumyar, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

SF Marbun, Moh.Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty.

Rochmat Soemitro, 1992, *Asas dan Perpajakan*, Bandung, Eresco.

Tony Marsyahrul, 2006, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Grasindo.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan, edisi revisi*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.

Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak*, Depok, RajaGrafindo Persada.

Hesel Nogi S. Tangkilisan, 2002, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Haw.Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.

Josef Rewu Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.

Oka Yoeti, 1995, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Angkasa.

Jurnal:

Teguh Budi Prasetya, Endang susilowati, Bambang Sugeng, “Evaluasi Kinerja Pengelolaan Obyek Wisata Pantai di DIY” *Jurnal Maksipreneur* Vol.V, No.1, Desember 2015.

Sunarto, Reni Dyah Ayu Nur Fatimah, “Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Penapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015” *Jurnal Akuntansi* Vol.4, No. 2 Desember 2016.

Puput Purpitasari, Kurnia, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol.4, No.11 (2015).

Rahmat Slamet Suyoto, Oktiva Anggraini, “Partisipasi Wanita Nelayan dalam Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul”, *Jurnal Media Wisata*, Volume 14, Nomor 2, November 2016.

Ahmad Nawawi, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis" Jurnal Nasional Pariwisata Volume 5, Nomor 2, Agustus 2013.

Ade Riawan, Dwi Endaryanti, "Akademi Pariwisata Indraprasta Yogyakarta" Jurnal Khasanah Ilmu Volume 8 No. 2 September 2017.

Anggalih Bayu Muh.Kamin, "Perwujudan Sistem Politik intrakomuitas dan Sinergi Pengelolaan Lingkungan" Jurnal Politica Vol.8 No.1 Mei 2017.

Gunawan Budiyanto, "Teknologi Konservasi Lengkap Gemuk Pasir Pantai Parangtritis" Jurnal Lanskap Indonesia Vol 3 No 2 2011.

Elita Susilawati, Ikhsan Budi Riharjo, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah" Jurnal Ilmu & Riset Manajemen Vol.3 No.8 2014.

Ryfal Yoduke, Sri Ayem, "Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014" Jurnal Akuntansi Vol.3 No.2 Desember 2015.

Web:

Hary Rachmat Riyadi, "Analisis Starategi Pemasaran Pariwisata pantai Parangtritis Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta"

<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/5794/C08hrr.pdf;jsessionid=233E85D28397F9FA38798DABC7F6A516?sequence=4>., diunduh pada hari

Jumat, 18 Agustus 2017, jam.19.03 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan.

Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.”